



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.475.497.419.170,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (84.181.568.135,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.391.315.851.035,00

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.620.497.419.170,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (90.057.999.979,58)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.530.435.419.190,42
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (139.123.568.155,42)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 155.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.876.431.844,58)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 147.123.568.155,42
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 8.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 28.033.510.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.695.040.218,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 37.728.550.218,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.393.696.464.499,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (103.813.119.059,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 1.289.883.345.440,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 53.767.444.671,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.936.510.706,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 63.703.955.377,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 4.021.660.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 4.021.660.000,00

b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	661.850.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		661.850.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	3.900.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.		3.900.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	19.450.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.695.040.218,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		29.145.040.218,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;

a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	1.140.987.292.449,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(103.813.119.059,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		1.037.174.173.440,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	177.949.262.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		177.949.262.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	74.759.910.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		74.759.910.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.		0,00

- b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.969.184.180,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>8.020.820.706,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | | Rp. 27.990.004.886,00 |
- c. Pendapatan dana penyesuaian
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.475.919.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>1.915.690.000,00</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | | Rp. 14.391.609.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.322.341.491,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya perubahan | | | Rp. 21.322.341.491,00 |

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja-belanja tidak langsung
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 597.676.650.245,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(1.650.709.728,58)</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | | Rp. 596.025.940.516,42 |
- b. Belanja-belanja langsung
- | | | | |
|---|-----|----------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.022.820.768.925,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(88.407.290.251,00)</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | | Rp. 934.413.478.674,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 268.406.772.245,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>6.540.104.271,42</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp. 274.946.876.516,42 |
- b. Belanja bunga
- | | | | |
|--|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |

c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	45.882.520.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>977.286.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	46.859.806.000,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	82.814.858.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.751.500.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	78.063.358.000,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	162.535.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.159.800.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	155.375.500.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	37.037.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.743.200.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	39.780.400.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	105.763.365.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.642.023.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	110.405.388.000,00

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	425.290.335.765,50
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>28.335.861.599,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	453.626.197.364,50

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	491.767.068.159,50
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(121.385.174.850,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	370.381.893.309,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah :		
1) Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.876.431.844,58)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	147.123.568.155,42)
b. Pengeluaran sejumlah :		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	8.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :		
1) Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.876.431.844,58)</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	147.123.568.155,42
b. Pencairan dana cadangan sejumlah :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana setelah perubahan	Rp.	0,00

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan : | | | Rp. 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
- | | | | |
|---|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan : | | | Rp. 0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :
- | | | | |
|--|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan : | | | Rp. 0,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan : | | | Rp. 0,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan : | | | Rp. 0,00 |

c. Pembayaran pokok utang sejumlah :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u> </u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan :		
	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u> </u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi setelah perubahan :		
	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal **27 Nopember 2013**

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal **27 Nopember 2013**

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAMSURIZON, SH, M.Si

Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun **2013** Nomor **10**

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2013

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	28,033,510,000.00	37,728,550,218.00	9,695,040,218.00	34.58
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	4,021,660,000.00	4,021,660,000.00	0	0
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	661,850,000.00	661,850,000.00	0	0
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	0	0
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19,450,000,000.00	29,145,040,218.00	9,695,040,218.00	49.85
4. 2.	Dana Perimbangan	1,393,696,464,499.00	1,289,883,345,440.00	(103,813,119,059.00)	(7.45)
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1,140,987,292,499.00	1,037,174,173,440.00	(103,813,119,059.00)	(9.10)
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	177,949,262,000.00	177,949,262,000.00	0	0
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	74,759,910,000.00	74,759,910,000.00	0	0
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	53,767,444,671.00	63,703,955,377.00	9,936,510,706.00	18.48
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	19,969,184,180.00	27,990,004,886.00	8,020,820,706.00	40.17
4. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12,475,919,000.00	14,391,609,000.00	1,915,690,000.00	15.36
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	21,322,341,491.00	21,322,341,491.00	0	0
	Jumlah	1,475,497,419,170.00	1,391,315,851,035.00	(84,181,568,135.00)	(5.71)
5.	BELANJA				
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	597,676,650,245.00	596,025,940,516.42	(1,650,709,728.58)	(0.28)
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	268,406,772,245.00	274,946,876,516.42	6,540,104,271.42	2.44
5. 1. 3.	Belanja Subsidi	45,882,520,000.00	46,859,806,000.00	977,286,000.00	2.13
5. 1. 4.	Belanja Hibah	82,814,858,000.00	78,063,358,000.00	(4,751,500,000.00)	(5.74)
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	162,535,300,000.00	155,375,500,000.00	(7,159,800,000.00)	(4.41)
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	37,037,200,000.00	39,780,400,000.00	2,743,200,000.00	7.41
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	0
5. 2.	Belanja Langsung	1,022,820,768,925.00	934,413,478,674.00	(88,407,290,251.00)	(8.64)
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	105,763,365,000.00	110,405,388,000.00	4,642,023,000.00	4.39
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	425,290,335,765.50	453,626,197,364.50	28,335,861,599.00	6.66
5. 2. 3.	Belanja Modal	491,767,068,159.50	370,381,893,309.50	(121,385,174,850.00)	(24.68)
	Jumlah	1,620,497,419,170.00	1,530,439,419,190.42	(90,057,999,979.58)	(5.56)
	Surplus / (Defisit)	(145,000,000,000.00)	(139,123,568,155.42)	5,876,431,844.58	0
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	155,000,000,000.00	147,123,568,155.42	(7,876,431,844.58)	(5.08)
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	155,000,000,000.00	147,123,568,155.42	(7,876,431,844.58)	(5.08)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	155,000,000,000.00	147,123,568,155.42	(7,876,431,844.58)	(5.08)
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(20.00)
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(20.00)
	Jumlah	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(20.00)
	Pembiayaan neto	145,000,000,000.00	139,123,568,155.42	(5,876,431,844.58)	(4.05)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)		0	0	0	0

Ranai, 27 November 2013

Bupati

ttd

ILYAS SABLII